

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019_____

**RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga rencana pembangunan daerah juga wajib memperhatikan 10

(sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renja adalah rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja PD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021 dan tidak menyimpang dari RKPD Tahun 2019 serta RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021. Renja Perangkat Daerah (PD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

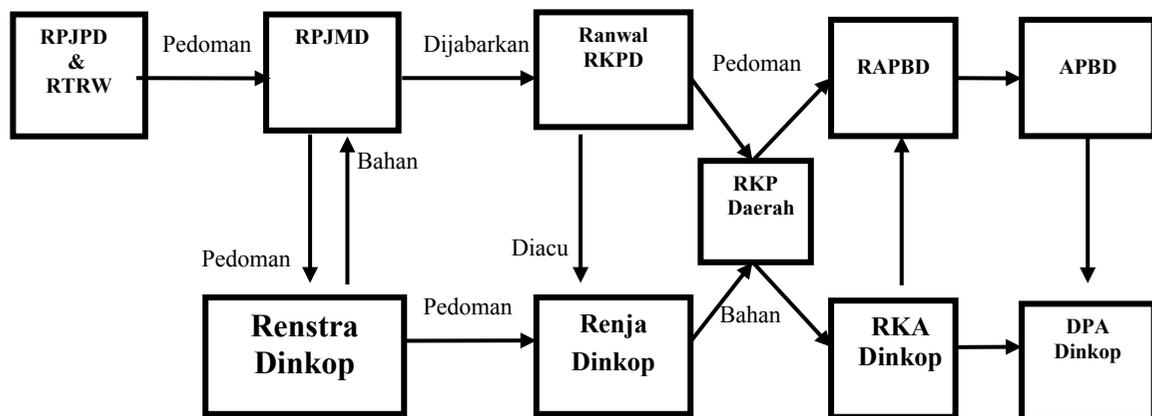
Keterkaitan Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah rancangan awal Renstra PD. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku PD juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) PD. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Tahun 2019 mengacu pada Renja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan RKA dan DPA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk

mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam mendukung Misi ke 4 (empat) Bupati Malang yaitu Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Renja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 yaitu Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan. Dan juga berkaitan dengan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yaitu Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2019.

Tujuan menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama Tahun 2019 serta mewujudkan efisiensi

dan evektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Rencana Strategis PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan 10 program dan 34 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sesuai dengan realisasi anggaran program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ke empat tahun 2017 dapat terealisasi 93,12%. Tingkat realisasi penyerapan anggaran tinggi pada triwulan ke empat tahun 2017 pada program Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dan program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, sebesar 48,02%, sedangkan Tingkat realisasi penyerapan anggaran terendah pada triwulan ke empat tahun 2017 pada program Program Peningkatan Pelayanan 65,97% karena program tersebut ada sebagian yang belum dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d 2018
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PD TAHUN 2016 s/d 2021 (ALHIR PERIODE RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2017	REALISASI RENJA PD TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Urusan Wajib									
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100	33,3 %	100 %	100
2.11.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	26.750 Buah	4.281 buah	4500 buah	3.752 buah	83,37	2.108 buah	5.860 buah	21,9
2.11.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	6 Bulan	18 Bulan	25
2.11.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	722 OB	132 OB	118 OB	118 OB	100	63 OB	154 OB	21,3

2.11. 2.11. 01.01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	36 OB	-	-	-	-	-	-
2.11. 2.11. 01.01 .10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	282 jenis	47 Jenis	47 Jenis	47 Jenis	100	63 Jenis	63 Jenis	22,3
2.11. 2.11. 01.01 .11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	85 jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	100	5 Jenis	14 Jenis	16,4
2.11. 2.11. 01.01 .12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	59 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100	5 Jenis	10 Jenis	16,9
2.11. 2.11. 01.01 .15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	6 jenis	1 Jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	1 Jenis	16,6
2.11. 2.11. 01.01 .16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Jenis	2 Jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 Jenis	16,6
2.11. 2.11. 01.01 .17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	29.419 HOK	3471 HOK	5001 HOK	5001 HOK	100	926 HOK	5.927 HOK	20,1
2.11. 2.11. 01.01 .18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	236 HOK	42 HOK	35 HOK	35 HOK	100	4 HOK	39 HOK	29,6
2.11. 2.11. 01.01 .19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1.692 HOK	295 HOK	267 HOK	267 HOK	100	16 HOK	283 HOK	16,7
2.11. 2.11. 01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100	53 %	100 %	100

		(%)								
2.11. 2.11. 01.02 .05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	5 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100	-	2 Unit	40
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.11. 2.11. 01.02 .07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	6 Jenis	-	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	4 jenis	66,6
2.11. 2.11. 01.02 .09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	21 Jenis	-	4 jenis	4 jenis	100	3 jenis	4 jenis	19
2.11. 2.11. 01.02 .10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	12 Jenis	-	-	-	-	4 jenis	4 jenis	33,3
2.11. 2.11. 01.02 .22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	262 Jenis	30 Jenis	27 jenis	27 jenis	100	2 jenis	27 jenis	10,3
2.11. 2.11. 01.02 .24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	144 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100	1 Unit	24 Unit	16,6
2.11. 2.11. 01.02 .28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 Jenis	5 Jenis	5 jenis	5 jenis	100	0 jenis	5 jenis	16,6
2.11. 2.11. 01.02 .29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Jenis	-	1 jenis	1 jenis	-	-	1 Jenis	25

2.11.2.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	-	100 %	100 %	100	0%	100 %	100
2.11.2.11.01.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	3 Unit	-	1 unit	1 unit	-	-	1 Unit	33
2.11.2.11.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	261 Stel	-	53 Stel	53 Stel	-	-	53 Stel	20
2.11.2.11.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100	8,3 %	8,3 %	8,3
2.11.2.11.01.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal	55 orang	13 Orang	11 Orang	11 Orang	100	1 Orang	12 Orang	21,8
2.11.2.11.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100	28,9 %	28,9 %	28,9
2.11.2.11.01.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	6 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	1 Buku	16,6
2.11.2.11.01.05.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	6 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	-	1 Buku	16,6
1.15.1.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah untuk kemudahan pelayanan bagi	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

		KUMKM								
1.15 . 1.15. 01.01 . 15.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dan yang dievaluasi tentang optimalisasi aset-aset Koperasi	54 kop/KUD	27 kop/KUD	27 kop/KUD	27 kop/KUD	100	-	27 kop/KUD	50
1.15 . 1.15. 01.01 . 15.12	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	1.200 Orang	1.200 Orang	1.200 Orang	1.200 Orang	100	-	1.200 Orang	100
1.15 . 1.15. 01.0 1 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase SDM KUMKM dalam pengembagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.15 . 1.15. 01.01 . 16.03	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan bimbingan teknis pengembangan kemitraan usaha sektor riil dan temu usaha pengembangan jaringan usaha Koperasi	70 Kop	70 koperasi	70 koperasi	70 koperasi	100	-	70 koperasi	100
1.15 . 1.15. 01.01 . 16.11	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan kerja	5.300 Orang	2.800 orang	2.500 orang	2.500 orang	100	-	2.500 orang	47,1
1.15 . 1.15. 01.0 1 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

1.15 . 1.15. 01.01 . 17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peningkatan akses pembiayaan Koperasi	90 Koperasi Wanita	-	90 Koperasi Wanita	90 Koperasi Wanita	100	-	90 Koperasi Wanita	100
1.15 . 1.15. 01.01 . 17.03	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah Koperasi penerima dana hibah pemerintah yang diberikan fasilitasi pembinaan	400 Kopwan/Ko pkar/KSPPS /Koppontren	200 Kopwan/Kopkar/K SPPS/Koppontren	200 Kopwan/Kopkar/K SPPS/Koppontren	200 Kopwan/Kopkar/K SPPS/Koppontren	100	-	200 Kopwan/Kopkar/K SPPS/Koppontren	50
1.15 . 1.15. 01.01 . 17.06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan UMKM (PLUT- KUMKM) yang diadakan	47 jenis	-	47 jenis	47 jenis	100	-	47 jenis	100
		Jumlah KUMKM yang difasilitasi Promosi dan Pameran	75 KUMKM	75 KUMKM	-	-	100	-	-	100
1.15 . 1.15. 01.01 . 17.08	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah KUMKM yang diberikan layanan berupa Fasilitasi, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran,TTG dan Peningkatan SDM UMKM)	300 Orang	300 Orang	-	-	100	-	-	100
		Jumlah UMKM yan difasilitasi promosi produk UMKM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	100 UMKM	-	100 UMKM	100 UMKM	100	-	100 UMKM	100

1.15 . 1.15. 01.01 . 17.09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah KUMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk KUMKM yang dipamerkan di luar daerah provinsi dan di tingkat nasional.	11 KUMKM	6 KUMKM	5 KUMKM	5 KUMKM	100	-	11 KUMKM	100
1.15 . 1.15. 01.01 . 17.10	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Peserta pelatihan pengembangan usaha retail dan pelatihan pengembangan usaha PKL	70 Koperasi dan 150 Orang	70 Koperasi	70 Koperasi	70 Koperasi	100	150 orang	70 Koperasi dan 150 Orang	100
1.15 . 1.15. 01.01 . 17.12	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi	Jumlah Koperasi beranggota Pelaku UMKM penerima dana pemerintah yang dimonitoring dan dievaluasi	70 Koperasi	35 Koperasi	35 Koperasi	35 Koperasi	100	-	70 Koperasi	100
1.15 . 1.15. 01.0 1 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.15 . 1.15. 01.01 . 18.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	290 Kopwan	150 Kopwan	140 Kopwan	140 Kopwan	100	-	140 Kopwan	100
1.15 . 1.15. 01.01 . 18.04	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Koperasi (Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi) yang diberikan bimbingan teknis perkoperasian dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan	97 KSPPS, 35 Koperasi dan 15 KEP	5 KEP	97 KSPPS, 35 Koperasi dan 10 KEP	97 KSPPS, 35 Koperasi dan 10 KEP	100	-	97 KSPPS, 35 Koperasi dan 10 KEP	100

		sosialisasi KEP								
1.15 . 1.15 . 01.01 . 18.05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestasi	10 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	100	-	5 Koperasi	50
1.15 . 1.15 . 01.01 . 18.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatan (Penilaian Kesehatan Koperasi)	360 Kop	180 Kop	180 Kop	180 Kop	100	-	180 Kop	50
1.15 . 1.15 . 01.0 1 .19	Program Peningkatan Pelayanan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Bantuan Dana Bergulir bagi KUMKM	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.15 . 1.15 . 01.01 . 19.02	Kegiatan Pendukung Pelayanan	jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan pelayanan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	255 KUMKM	130 KUMKM	125 KUMKM	125 KUMKM	100	-	125 KUMKM	49
2.11 . 2.11 . 01.0 1 . 06	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	100 %	-	-	-	-	83,3 %	83,3 %	83,3
2.11 . 2.11 . 01.01 . 06 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	420 Koperasi Wanita	-	-	-	-	140 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	33,3
		Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi	330 orang	-	-	-	-	110 Orang	110 Orang	33,3

		perkoperasian								
2.11 . 2.11. 01.01 .06 . 02	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	300 orang	-	-	-	-	100 Orang	100 orang	33,3
2.11 . 2.11. 01.01 .06 . 03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	15 Koperasi	-	-	-	-	5 Koperasi	5 Koperasi	33,3
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	105 Koperasi	-	-	-	-	50 Koperasi	50 Koperasi	47,6
2.11 . 2.11. 01.0 1 . 07	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	100 %	-	-	-	-	28 %	28 %	28
2.11 . 2.11. 01.01 .07 . 01	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	340 Koperasi	-	-	-	-	40 Koperasi	40 Koperasi	11,7
2.11 . 2.11. 01.01 .07 . 02	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	180 Koperasi/U MK	-	-	-	-	30 Koperasi/UMK	30 Koperasi/UMK	16,6

2.11 . 2.11. 01.01 . 07 . 03	Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	420 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	11,9
2.11 . 2.11. 01.0 1 . 08	Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	100 %	-	-	-	-	48 %	48 %	48
2.11 . 2.11. 01.01 . 08 . 01	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	939 Koperasi	-	-	-	-	97 Koperasi	97 Koperasi	10,3
2.11 . 2.11. 01.01 . 08 . 02	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	360 Koperasi	-	-	-	-	120 Koperasi	120 Koperasi	33,3
2.11 . 2.11. 01.01 . 08 . 03	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	405 Koperasi	-	-	-	-	80 Koperasi	80 Koperasi	19,7
2.11 . 2.11. 01.0 1 . 09	Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	100 %	-	-	-	-	19,6 %	19,6 %	19,6
2.11 . 2.11. 01.01 . 09 . 01	Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	450 Orang	-	-	-	-	80 Orang	80 Orang	33,3

		Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	6 Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi ,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	45 Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
2.11 . 2.11. 01.01 .09 . 02	Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	300 Orang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	225 Orang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	225 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2.11 . 2.11. 01.01 .09 . 03	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten	1 Pameran	-	-	-	-	0 Pameran	0 Pameran	0
	Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	6 Kali	-	-	-	-	-	-	-

		Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	3 Kali	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	300 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2.11 . 2.11. 01.0 1 . 19	Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	100 %	-	-	-	-	49 %	49 %	49
2.11 . 2.12. 01.01 . 19.02	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	375 KUMKM	-	-	-	-	48 KUMKM	48 KUMKM	12,8
2.11 . 2.11. 01.0 1 . 11	XVI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100 %	-	-	-	-	0 %	0 %	0
2.11 . 2.11. 01.01 . 11 . 01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	7500 Orang	-	-	-	-	0 Orang	0 Orang	0
		Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan,penigkatan kualitas dan manajemen usaha	900 Orang	-	-	-	-	-	-	-

2.11 . 2.11. 01.01 . 11 . 02	Fasilitasi Promosi bagi Usaha mandiri masyarakat	Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	24 Kali	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pameran tingkat lokal, tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	18 Kali	-	-	-	-	-	-	-

Dengan melihat Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai 10 program yang terdiri dari 34 kegiatan dan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018 pada triwulan ke II (dua) sudah terealisasi rata-rata sebesar 29,90 % sehingga Kegiatan tetap berjalan dan dapat dilaksanakan lebih optimal sesuai dengan target, sedangkan untuk target Renstra Tahun 2016 s/d 2021 Pemanfaatan dana tepat sasaran bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sampai saat ini naik 65 % dari target semula. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mendukung Pengarus Utamaan Gender meliputi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro dengan kegiatan Sosialisasi prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian, Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro dengan Kegiatan Pengembangan Inkubator Teknologi dan bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi, Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan Kegiatan Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Program Pengembangan dan Restrukturasi Usaha dengan Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama

Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan/ajuan dari PD, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Teknis yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Malang dengan kegiatan antara lain : koordinasi, konsultasi, pengumpulan data, Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi, Pembinaan, evaluasi dan monitoring sehingga mobilitasnya cukup tinggi.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang pada intinya adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, , serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai bidang tugasnya dan mengolah data sampai dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang meliputi:

- a. Sebagai Lembaga yang membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Melaksanakan Supremasi Hukum di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Menumbuh dan Mengembangkan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. Meningkatkan ketrampilan, teknologi proses dan jaringan distribusi serta menyediakan fasilitas konsultasi dan informasi bagi Pengusaha Mikro untuk memperluas akses pasar;
- f. Meningkatkan Akses Koperasi dan Usaha Mikro terhadap pemanfaatan sumber daya produktif pada Masyarakat;
- g. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan;
- h. Mengembangkan Pola Kerjasama Kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Perbankan, Swasta, BUMN / BUMD dan Lembaga Keuangan Lainnya;
- i. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data untuk kebutuhan perencanaan, monitoring dan evaluasi;
- j. Tugas lain yang diberikan oleh Bupati kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, maka telah dihasilkan dokumen perencanaan utama Kabupaten Malang yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sasaran I yaitu Persentase Jumlah Koperasi Aktif dengan target 80% pada tahun 2017 tercapai 100% sedangkan sasaran II yaitu persentase pertumbuhan UMKM dengan target 0,50% pada tahun 2017 tercapai 0,51% sehingga program dan kegiatan yang telah dilakukan berjalan dengan baik terutama dengan adanya UPT Pengelola Dana Bergulir, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM, maka dapat memberi dukungan maupun memberikan fasilitas kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang sehingga akan semakin mengalami peningkatan dengan harapan akan berdampak positif bagi perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Restra PD Tahun ke				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Koperasi Aktif	-	√	80%	80%	-	-	100%	80%	-	-	
2	Persentase Pertumbuhan UMKM	-	√	0.50%	0.50%	-	-	0.51%	0.50%	-	-	
3	Persentase Koperasi Rehabilitasi	-	√	-	-	2,7%	1,9%	-	-	2,7%	1,9%	
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang mendapatkan Legalitas Usaha	-	√	-	-	0,05%	0,05%	-	-	0,05%	0,05%	
Indikator program-program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro												
1	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	-	-	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
8	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	

9	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
13	Persentase SDM KUMKM dalam pengembagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
14	Persentase peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
15	Persentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
16	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Bantuan Dana Bergulir bagi KUMKM	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	

Indikator Kegiatan-kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	-	-	4500 Buah								
2	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	-	-	12 Bulan								
3	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	-	-	118 OB	144 OB	204 OB	204 OB	118 OB	144 OB	204 OB	204 OB	
4	Jumlah petugas kebersihan (OB)	-	-	36 OB	-	-	-	36 OB	-	-	-	
5	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	-	-	47 Jenis	63 Jenis	70 Jenis	70 Jenis	47 Jenis	63 Jenis	70 Jenis	70 Jenis	
6	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	-	-	14 Jenis	12 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	12 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	
7	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	-	-	9 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	9 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	
8	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	-	-	1 Jenis								
9	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	-	-	2 Jenis								
10	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	-	-	5001 HOK	3183 HOK	5000 HOK	5000 HOK	5001 HOK	3183 HOK	5000 HOK	5000 HOK	
11	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	-	-	35 HOK	35 HOK	40 HOK	40 HOK	35 HOK	35 HOK	40 HOK	40 HOK	

12	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	-	-	267 HOK	275 HOK	275 HOK	275 HOK	267 HOK	275 HOK	275 HOK	275 HOK	
13	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	-	-	-	-	1 Unit	-	-	-	1 Unit	-	
14	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	
15	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	-	-	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	
16	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	-	-	4 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	
17	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	
18	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	27 Jenis	24 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	24 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	
19	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	-	-	24 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	24 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	
20	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	
21	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	1 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	
22	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	
23	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	-	-	53 Stel	-	60 Stel	60 Stel	53 Stel	-	60 Stel	60 Stel	
24	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	-	-	11 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	11 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	
25	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	-	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
26	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	-	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
27	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	-	-	-	140 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	-	140 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	
28	Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	-	-	-	110 Orang	110 Orang	110 Orang	-	110 Orang	110 Orang	110 Orang	
29	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
30	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	-	-	-	5 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	-	5 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	
31	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	-	-	-	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	-	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	
32	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	-	-	-	80 Koperasi	100 Koperasi	120 Koperasi	-	80 Koperasi	100 Koperasi	120 Koperasi	
33	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	-	-	-	55 Koperasi/U	60 Koperasi/UM	60 Koperasi/U	-	55 Koperasi	60 Koperasi/U	60 Koperasi/U	

					MK	K	MK		/UMK	MK	MK	
34	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	-	-	-	100 Orang	120 Orang	150 Orang	-	100 Orang	120 Orang	150 Orang	
35	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	-	-	-	97 Koperasi	313 Koperasi	313 Koperasi	-	97 Koperasi	313 Koperasi	313 Koperasi	
36	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	-	-	-	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	-	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	
37	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	-	-	-	80 Koperasi	135 Koperasi	135 Koperasi	-	80 Koperasi	135 Koperasi	135 Koperasi	
38	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	-	-	-	80 Orang	150 Orang	150 Orang	-	80 Orang	150 Orang	150 Orang	
39	Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	-	-	-	-	2 Kecamatan	2 Kecamatan	-	-	2 Kecamatan	2 Kecamatan	
40	Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	-	-	-	-	15 Kecamatan	15 Kecamatan	-	-	15 Kecamatan	15 Kecamatan	
41	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	-	-	-	-	100 Orang	100 Orang	-	-	100 Orang	100 Orang	
42	Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	-	-	-	-	75 Orang	75 Orang	-	-	75 Orang	75 Orang	
43	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	-	-	-	-	75 Orang	75 Orang	-	-	75 Orang	75 Orang	
44	Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten	-	-	-	1 Pameran	-	-	-	1 Pameran	-	-	
45	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	-	-	-	-	2 Kali	2 Kali	-	-	2 Kali	2 Kali	
46	Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	-	-	1 Kali	1 Kali	
47	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	-	-	-	-	100 Orang	100 Orang	-	-	100 Orang	100 Orang	
48	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	-	-	0 KUMKM	125 KUMKM	125 KUMKM	125 KUMKM	0 KUMKM	125 KUMKM	125 KUMKM	125 KUMKM	
49	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	-	-	-	-	300 Orang	300 Orang	-	-	300 Orang	300 Orang	

50	Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan,peningkatan kualitas dan manajemen usaha	-	-	-	2500 Orang	2500 Orang	2500 Orang	-	2500 Orang	2500 Orang	2500 Orang	
51	Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	-	-	-	-	6 Kali	6 Kali	-	-	6 Kali	6 Kali	
52	Jumlah Pameran tingkat lokal,tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	-	-	-	35 UMK	-	-	-	35 UMK	-	-	
53	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dan yang dievaluasi tentang optimalisasi aset-aset koperasi	-	-	27 Koperasi/K UD	-	-	-	27 Koperasi /KUD	-	-	-	
54	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	Jumlah Koperasi yang diberikan bimbingan teknis pengembangan kemitraan usaha sektor riil dan temu usaha pengembangan jaringan usaha Koperasi	-	-	70 Koperasi	-	-	-	70 Koperasi	-	-	-	
56	jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan kerja	-	-	2500 Orang	-	-	-	2500 Orang	-	-	-	
57	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	-	-	140 Koperasi Wanita	-	-	-	140 Koperasi Wanita	-	-	-	
58	Jumlah Koperasi (Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi) yang diberikan bimbingan teknis perkoperasian dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi KEP	-	-	142 KSPPS,Koperasi dan KEP	-	-	-	142 KSPPS,Koperasi dan KEP	-	-	-	
59	Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestas	-	-	5 Koperasi	-	-	-	5 Koperasi	-	-	-	
60	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)	-	-	180 Koperasi	-	-	-	180 Koperasi	-	-	-	
61	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	-	-	140 Koperasi Wanita	-	-	-	140 Koperasi Wanita	-	-	-	
62	Jumlah Koperasi (Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi) yang diberikan bimbingan teknis perkoperasian dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi KEP	-	-	142 KSPPS,Koperasi dan KEP	-	-	-	142 KSPPS,Koperasi dan KEP	-	-	-	
63	Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestas	-	-	5 Koperasi	-	-	-	5 Koperasi	-	-	-	
64	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)	-	-	180 Koperasi	-	-	-	180 Koperasi	-	-	-	
65	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peningkatan akses pembiayaan Koperasi	-	-	90 Koperasi	-	-	-	90 Koperasi	-	-	-	

66	Jumlah Koperasi penerima dana hibah pemerintah yang diberikan fasilitasi pembinaan	-	-	200 Kopwan/K opkar/KSP PS	-	-	-	200 Kopwan/ Kopkar/ KSPPS	-	-	-	
67	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) yang diadakan	-	-	47 Jenis	-	-	-	47 Jenis	-	-	-	
68	Jumlah UMKM yan difasilitasi promosi produk UMKM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	-	-	100 UMKM	-	-	-	100 UMKM	-	-	-	
69	Jumlah KUMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk KUMKM yang dipamerkan di luar daerah provinsi dan di tingkat nasional.	-	-	5 KUMKM	-	-	-	5 KUMKM	-	-	-	
70	Jumlah Peserta pelatihan pengembangan usaha retail dan pelatihan pengembangan usaha PKL	-	-	150 Orang	-	-	-	150 Orang	-	-	-	
71	Jumlah Koperasi beranggota Pelaku UMKM penerima dana pemerintah yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	35 Koperasi	-	-	-	35 Koperasi	-	-	-	
72	jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan pelayanan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	-	-	125 KUMKM	-	-	-	125 KUMKM	-	-	-	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Malang yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, maka peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Madep Mantep Manetep” adalah dengan Mewujudkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai daya saing tinggi serta mendukung iklim usaha yang kondusif, dan akan berpengaruh pada penciptaan kondisi ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah yaitu dengan cara melaksanakan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip perkopersian dan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang antara lain:

- a. Kurang adanya pemahaman Pelayanan tentang Perkopersian dan Kewirausahaan dari satuan kerja terkait di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang terkait Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima sangat tinggi;
- b. Berlakunya perdagangan bebas menyebabkan tingkat persaingan semakin kompetitif bagi Pelaku UMKM dan Koperasi
- c. Krisis keuangan dan perekonomian global serta dampaknya terhadap keuangan dan perekonomian Nasional dan daerah.
- d. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
- e. Sumberdaya manusia
Keterbatasan kemampuan dan pemahaman para pengelola koperasi tentang teknis perkopersian serta pemahaman tentang wawasan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan kurang memadai, sehingga berdampak kepada pengelolaan manajemen, produktifitas Koperasi dan UKM.
- f. Permodalan

Kemampuan pemupukan permodalan sendiri bagi anggota Koperasi dan UMKM masih terbatas dan Kemitraan dengan Perbankan dalam membuka terobosan usaha baru masih belum optimal.

- g. Teknologi
Kemampuan dalam mengakses teknologi dan alih teknologi masih kurang sehingga belum menghasilkan produksi dengan kualitas dan nilai tambah yang efisien.
- h. Kerjasama Usaha / Jaringan Usaha
Kerjasama antar koperasi baik vertikal maupun horisontal dengan badan usaha lain belum dapat berkembang, koperasi masih bekerja untuk kepentingan sendiri dan kurang mampu mempergunakan sarana komunikasi dan teknologi.
- i. Pasar
Belum memanfaatkan peluang pasar yang dimiliki oleh Koperasi dan UMKM utamanya dalam pelayanan kebutuhan anggota dan masyarakat.

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang bertujuan antara lain menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan *good governance*, sehingga diharapkan dengan adanya SOP setiap unit kerja dapat menerapkan prosedur kerja dan sistim kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Penguatan dan Perluasan Akses Usaha dan Jaringan Pasar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PLUT-KUMKM maupun pameran-pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- c. Memberikan Fasilitas Perkuatan Kemandirian Usaha Mikro dengan cara pembinaan atau bimtek;
- d. Memberikan pemahaman pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan KUMKM serta menumbuhkan Wirausaha baru;

- e. Memberikan Bimtek agar kualitas SDM pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) meningkat;
- f. Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PPK BLUD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang atau dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan serta dengan Lembaga Perbankan maupun Lembaga non Bank;
- g. Memberikan pelatihan-pelatihan KUMKM yang berbasis IPTEK;
- h. Memberikan akses maupun pemahaman kepada KUMKM agar mampu mempergunakan sarana komunikasi dan teknologi dengan baik;
- i. Memberikan pemahaman kepada anggota tentang arti pentingnya koperasi;

Adapun tantangan dan peluang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1. Tantangan

- a. Dengan adanya AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- b. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
- c. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar.
- d. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kurang.
- e. Kurangnya pemahaman peinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
- f. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan UMKM

2. Peluang

- a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas untuk ASEAN yaitu AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku
- b. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Adanya Arah kebijakan pembangunan daerah dalam memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan

jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan

- d. Adanya dukungan stakeholder dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Sumberdaya Alam Kabupaten Malang terkandung kekayaan yang tiada tara dan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan UMKM.

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten.
2. Masih terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM).
3. Tingkat kemiskinan masih tinggi didasari dengan angka kemiskinan Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebesar 11.07%.
4. Daya saing Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang masih lemah dan terbatas.
5. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) pada tahun 2016 di Kabupaten Malang yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM dapat dijadikan fasilitas bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing.
6. Pembangunan Pasar Rakyat di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada tahun 2016 dan Pasar rakyat di Kecamatan Ngantang pada tahun 2017 yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM merupakan salah satu fasilitas untuk meningkatkan promosi agar lebih baik.

Dari analisa-analisa diatas merupakan isu-isu strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan dan merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang, oleh karenanya peningkatan kinerja

merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tahun 2016 merupakan masa transisi pemerintahan di Kabupaten Malang. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga mengalami perubahan.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan hasil sebagai berikut:

1. Adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka perlu penambahan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan koperasi dan restrukturisasi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah, maka perlu diakomodir dalam Rencana Kerja Tahun 2019.
2. Adanya perubahan anggaran hasil analisis kebutuhan, perubahan anggaran tersebut terdapat pada program Peningkatan Peningkatan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro, Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pengembangan dan restrukturisasi Usaha, Peningkatan

permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Pembinaan Lingkungan Sosial Industri.

3. Adanya perubahan anggaran hasil analisis kebutuhan, perubahan anggaran tersebut terdapat pada kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Pengadaan Kendaraan dinas operasional, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur , Pendidikan dan Pelatihan Formal, Laporan kinerja PD, Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi, Penguatan manajemen Usaha dan Daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pameran tingkat regional dan nasional, Pengembangan Inkubator teknologi dan bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi, Koordinasi dan Penguatan akses permodalan Koperasi serta jaringan kerjasama usaha simpan pinjam antar Koperasi, Penataan Manajemen Usaha Simpan pinjam Koperasi, Penilaian Kesehatan Koperasi, Pengembangan Jaringan Kerjasama Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, Pengembangan kewirausahaan, Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro, Peningkatan permodalan KUMKM melalui Dana Bergulir, Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri dan masyarakat.
4. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan

Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor.

5. Adanya tambahan satu program yaitu Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, program tersebut dikhususkan untuk dana DBHACT

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2019

30

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	BELANJA LANGSUNG				7.034.927.750	BELANJA LANGSUNG				4.380.000.000	
1.	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	812.122.000	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	964.528.800	
1.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4500 buah	180.060.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4500 Buah	5.050.000	
1.2.	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	70.220.000	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	66.000.000	
1.3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	118 OB	57.690.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	144 OB	467.913.000	
1.4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Griya UMKM Kab. Malang	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	57.215.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Griya UMKM Kab. Malang	Jumlah petugas kebersihan (OB)	-	-	
1.5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	47 Jenis	73.980.100	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	63 Jenis	86.564.000	
1.6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	14 Jenis	57.632.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Jenis	62.544.800	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan telah dilaksanakan dengan baik pada masing-masing wilayah kecamatan.

Dalam urusan bidang koperasi dan usaha mikro, Kecil dan menengah jumlah usulan dari Kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan Anggaran. Diakui pula sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas yang didasarkan atas kajian yang komprehensif, selain itu juga untuk membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang khususnya urusan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah maka, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sangat dibutuhkan sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan masyarakat Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Desa Clumprit, Sidorejo, Pagelaran, Brongkal, Karangsono, Kanigoro, Balarjo, Kademangan, Suwaru Kecamatan Pagelaran	Jumlah Penerima Permodalan 9 Kopwan	9 Koperasi Wanita	Disepakati Dalam Bentuk Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Melalui Upt Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Dengan Syarat Yang Ditentukan
2	Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Dusun Rambaan Rt. 10 Rw.03 Desa Randugading, Kecamatan Tajinan	Tambahan Modal Koperasi Untuk 305 Anggota	Koperasi Wanita Budi Mulia	Disepakati Dalam Bentuk Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Melalui Upt Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Dengan Syarat Yang Ditentukan
3	Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Desa Sumbertempur, Kecamatan Wonosari	Terpenuhinya Permodalan Masyarakat	10 orang	Disepakati Dalam Bentuk Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Melalui Upt Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Dengan Syarat Yang Ditentukan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan Koperasi di era Undang - Undang No. 32 Tahun 2004, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 yang mana selalu dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Koperasi dan UMKM yang menjadi primadona kebijakan Presiden terpilih, dan pada kebijakan ini pemerintah berharap dalam mengelola urusan pemeritahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang salah satu dinas teknis di Kabupaten Malang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai bidang tugasnya dan mengolah data sampai dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada

semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan penganggaran. Pada tahun 2003 diterbitkan keputusan menteri dalam negeri nomor 132 tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

a. Tujuan

Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro.

b. Sasaran

Meningkatnya usaha koperasi dan usaha mikro

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan melihat Lampiran Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2018 telah disesuaikan dengan anggaran dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran;
 - (1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - (2) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
 - (4) Penyediaan alat tulis kantor
 - (5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - (6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - (7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- (8) Penyediaan bahan logistik kantor
- (9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- (10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- (11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - (1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - (2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - (3) Pengadaan Mebeleur
 - (4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - (5) Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - (6) Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - (1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - (2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 5. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
 - (2) Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
 - (3) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
- 6. Program Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Penguatan manajemen Usaha dan Daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
 - (2) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pameran tingkat regional dan nasional
 - (3) Pengembangan Inkubator teknologi dan bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi
- 7. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Koordinasi dan Penguatan akses permodalan Koperasi serta jaringan kerjasama usaha simpan pinjam antar Koperasi

- (2) Penataan Manajemen Usaha Simpan pinjam Koperasi
- (3) Penilaian Kesehatan Koperasi
- 8. Program Pengembangan dan restrukturasi Usaha
 - (1) Pengembangan Jaringan Kerjasama
 - (2) Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro
- 9. Program Peningkatan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Peningkatan permodalan KUMKM melalui Dana Bergulir
- 10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri
 - (1) Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun akan dituangkan pada 4 program 4 Kegiatan yaitu :

- 1. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Kegiatan sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
- 2. Program Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Kegiatan Pengembangan Inkubator teknologi dan bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi
- 3. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Penataan Manajemen Usaha Simpan pinjam Koperasi
- 4. Program Pengembangan dan Restrukturasi Usaha
 - (1) Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN MALANG

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.380.000.000			7.846.058.155		
2.211	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				4.380.000.000			7.846.058.155		
2.211.16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				4.380.000.000			7.846.058.155		
2.211.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	964.528.800			100%	1.213.745.800	
2.211.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	4500 Buah	5.050.000	APBD Kabupaten		4500 Buah	11.050.000	
2.211.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	12 Bulan	66.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	76.000.000	
2.211.16.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	144 OB	467.913.000	APBD Kabupaten		204 OB	567.913.000	
2.211.16.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	63 Jenis	86.564.000	APBD Kabupaten		70 Jenis	96.420.100	
2.211.16.01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Jenis	62.544.800	APBD Kabupaten		14Jenis	86.564.000	

2.211.16.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	10 Jenis	8.570.000	APBD Kabupaten		10 Jenis	62.544.800	
2.211.16.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Jenis	2.940.000	APBD Kabupaten		1 Jenis	8.570.000	
2.211.16.01.08	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Jenis	11.328.000	APBD Kabupaten		2 Jenis	2.940.000	
2.211.16.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3183 HOK	64.268.000	APBD Kabupaten		5.000 HOK	11.328.000	
2.211.16.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	35 HOK	98.226.000	APBD Kabupaten		40 HOK	64.268.000	
2.211.16.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	275 HOK	91.125.000	APBD Kabupaten		275 HOK	98.226.000	
2.211.16.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	215.958.500			100%	385.592.190	
2.211.16.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Unit	-	APBD Kabupaten		2 Unit	45.000.000	
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	Dinas Koperasi dan UM	2 Unit	-	APBD Kabupaten		0 Unit	0	
2.211.16.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Jenis	21.305.000	APBD Kabupaten		4 Jenis	41.305.000	
2.211.16.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha	3 Jenis	34.343.500	APBD Kabupaten		4 Jenis	60.000.000	

			Mikro							
2.211.16.02.04	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Jenis	55.000.000	APBD Kabupaten		4 Jenis	75.000.000	
2.211.16.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	24 Jenis	52.205.000	APBD Kabupaten		27 Jenis	75.000.000	
2.211.16.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	28 Unit	38.650.000	APBD Kabupaten		28 Unit	51.532.190	
2.211.16.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 Jenis	14.455.000	APBD Kabupaten		5 Jenis	22.755.000	
2.211.16.02.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Jenis	-	APBD Kabupaten		2 Jenis	15.000.000	
2.211.16.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	-			100%	30.800.000	
2.211.16.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Unit	-	APBD Kabupaten		0 Unit	0	
2.211.16.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Dinas Koperasi dan UM	60 Stel	-	APBD Kabupaten		60 Stel	30.800.000	
2.211.16.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	7.200.000			100%	9.000.000	
2.211.16.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	15 Orang	7.200.000	APBD Kabupaten		15 Orang	9.000.000	

2.211.16.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	19.939.000			100%	35.564.000	
2.211.16.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Buku	16.440.000	APBD Kabupaten		1 Buku	25.365.000	
2.211.16.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Buku	3.499.000	APBD Kabupaten		1 Buku	10.199.000	
2.211.16.06	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan		100%	204.560.150			100%	214.457.215	
2.211.16.06.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	Kabupaten Malang	140 Koperasi Wanita	65.564.000	APBD Kabupaten		140 Koperasi Wanita	72.284.500	
		Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	Kabupaten Malang	110 Orang	16.144.000	APBD Kabupaten		110 Orang	18.646.000	
2.211.16.06.02	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	Kabupaten Malang	100 Orang	52.307.000	APBD Kabupaten		100 Orang	60.414.000	
2.211.16.06.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	Kabupaten Malang	5 Koperasi	26.046.400	APBD Kabupaten		5 Koperasi	28.715.715	
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	Kabupaten Malang	50 Koperasi	31.499.000	APBD Kabupaten		50 Koperasi	34.397.000	
2.211.16.07	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran		100%	397.090.000			100%	410.000.000	

2.211.16.07.01	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	Kabupaten Malang	80 Koperasi	91.356.000	APBD Kabupaten		120 Koperasi	100.000.000	
2.211.16.07.02	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	Kabupaten Malang	55 Koperasi/UMK	225.000.000	APBD Kabupaten		60 Koperasi/UMK	200.000.000	
2.211.16.07.03	Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	Kabupaten Malang	100 Orang	80.734.000	APBD Kabupaten		150 Orang	110.000.000	
2.211.16.10	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan		100%	446.723.300			100%	558.148.950	
2.211.16.10.01	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	Kabupaten Malang	97 Koperasi	145.217.300	APBD Kabupaten		313 Koperasi	217.254.500	
2.211.16.10.02	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Malang	120 Koperasi	161.504.000	APBD Kabupaten		120 Koperasi	120.450.000	
2.211.16.10.03	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Kabupaten Malang	80 Koperasi	140.002.000	APBD Kabupaten		135 Koperasi	220.444.450	
2.211.16.08	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi		100%	257.000.000			100%	2.107.500.000	
2.211.16.08.02	Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	Kabupaten Malang	80 Orang	55.000.000	APBD Kabupaten		150 Orang	68.250.000	
		Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	Kabupaten Malang	0 Kecamatan	-	APBD Kabupaten		5 Kecamatan	375.000.000	

		Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	Kabupaten Malang	0 Kecamatan	-	APBD Kabupaten		33 Kecamatan	299.250.000	
2.211.16.08.01	Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	Kabupaten Malang	0 Orang	-	APBD Kabupaten		200 Orang	262.500.000	
		Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	Kabupaten Malang	0 Orang	-	APBD Kabupaten		150 Orang	157.500.000	
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	Kabupaten Malang	0 Orang	-	APBD Kabupaten		150 Orang	157.500.000	
2.211.16.08.04	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah Fasilitas promosi di tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten	Kabupaten Malang	1 Pameran	202.000.000	APBD Kabupaten		-	-	
2.211.16.08.03	Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	Kabupaten Malang	0 Kali	-	APBD Kabupaten		4 Kali	420.000.000	
		Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	Kabupaten Malang	0 Kali	-	APBD Kabupaten		2 Kali	210.000.000	
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	Kabupaten Malang	0 Orang	-	APBD Kabupaten		200 Orang	157.500.000	
2.211.16.09	PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir		100%	330.000.000			100%	335.000.000	
2.211.16.09.01	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	Kabupaten Malang	125 KUMKM	330.000.000	APBD Kabupaten		125 KUMKM	335.000.000	
2.211.16.11	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan		100%	1.550.000.000			100%	2.546.250.000	
2.211.16.11.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	Kabupaten Malang	2500 Orang	1.550.000.000	DBHCHT		2500 Orang	1.627.500.000	
		Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan,peningkatan kualitas dan manajemen usaha	Kabupaten Malang	0 Orang	-	DBHCHT		300 Orang	477.750.000	
2.211.16.11.02	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri	Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	Kabupaten Malang	0 Kali	-	DBHCHT		6 Kali	315.000.000	

	Masyarakat									
		Jumlah Pameran tingkat lokal, tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	Kabupaten Malang	0 Kali	-	DBHCHT		8 Kali	126.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2019 adalah Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan Rencana Anggaran Tahun 2019 dapat mencukupi kebutuhan dan untuk mendukung Program/Kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.380.000.000	
2.211	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				4.380.000.000	
2.211.16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				4.380.000.000	
2.211.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	964.528.800	
2.211.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	4500 Buah	5.050.000	APBD Kabupaten
2.211.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	12 Bulan	66.000.000	APBD Kabupaten
2.211.16.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	144 OB	467.913.000	APBD Kabupaten
2.211.16.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	63 Jenis	86.564.000	APBD Kabupaten
2.211.16.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Jenis	62.544.800	APBD Kabupaten
2.211.16.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	10 Jenis	8.570.000	APBD Kabupaten
2.211.16.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Jenis	2.940.000	APBD Kabupaten
2.211.16.01.08	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Jenis	11.328.000	APBD Kabupaten
2.211.16.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3183 HOK	64.268.000	APBD Kabupaten
2.211.16.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	35 HOK	98.226.000	APBD Kabupaten

2.211.16.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	275 HOK	91.125.000	APBD Kabupaten
2.211.16.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	215.958.500	
2.211.16.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Unit	-	APBD Kabupaten
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	Dinas Koperasi dan UM	2 Unit	-	APBD Kabupaten
2.211.16.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Jenis	21.305.000	APBD Kabupaten
2.211.16.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Jenis	34.343.500	APBD Kabupaten
2.211.16.02.04	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Jenis	55.000.000	APBD Kabupaten
2.211.16.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	24 Jenis	52.205.000	APBD Kabupaten
2.211.16.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	28 Unit	38.650.000	APBD Kabupaten
2.211.16.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 Jenis	14.455.000	APBD Kabupaten
2.211.16.02.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Jenis	-	APBD Kabupaten
2.211.16.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	-	
2.211.16.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Unit	-	APBD Kabupaten
2.211.16.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	60 Stel	-	APBD Kabupaten
2.211.16.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	7.200.000	
2.211.16.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	15 Orang	7.200.000	APBD Kabupaten
2.211.16.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	19.939.000	

2.211.16.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Buku	16.440.000	APBD Kabupaten
2.211.16.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Buku	3.499.000	APBD Kabupaten
2.211.16.06	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan		100%	204.560.150	
2.211.16.06.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	Kabupaten Malang	140 Koperasi Wanita	65.564.000	APBD Kabupaten
		Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	Kabupaten Malang	110 Orang	16.144.000	DAK
2.211.16.06.02	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	Kabupaten Malang	100 Orang	52.307.000	APBD Kabupaten
2.211.16.06.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	Kabupaten Malang	5 Koperasi	26.046.400	APBD Kabupaten
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	Kabupaten Malang	50 Koperasi	31.499.000	APBD Kabupaten
2.211.16.07	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran		100%	397.090.000	
2.211.16.07.01	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	Kabupaten Malang	80 Koperasi	91.356.000	APBD Kabupaten
2.211.16.07.02	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	Kabupaten Malang	55 Koperasi/UMK	225.000.000	APBD Kabupaten
2.211.16.07.03	Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	Kabupaten Malang	100 Orang	80.734.000	APBD Kabupaten
2.211.16.10	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan		100%	446.723.300	
2.211.16.10.01	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	Kabupaten Malang	97 Koperasi	145.217.300	APBD Kabupaten

2.211.16.10.02	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Malang	120 Koperasi	161.504.000	APBD Kabupaten
2.211.16.10.03	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Kabupaten Malang	80 Koperasi	140.002.000	APBD Kabupaten
2.211.16.08	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi		100%	257.000.000	
2.211.16.08.02	Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	Kabupaten Malang	80 Orang	55.000.000	APBD Kabupaten
		Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	Kabupaten Malang	0 Kecamatan	-	APBD Kabupaten
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	Kabupaten Malang	0 Kecamatan	-	APBD Kabupaten
2.211.16.08.01	Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	Kabupaten Malang	0 Orang	-	APBD Kabupaten
		Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	Kabupaten Malang	0 Orang	-	APBD Kabupaten
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	Kabupaten Malang	0 Orang	-	APBD Kabupaten
2.211.16.08.04	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah Fasilitas promosi di tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten	Kabupaten Malang	1 Pameran	202.000.000	APBD Kabupaten
2.211.16.08.03	Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	Kabupaten Malang	0 Kali	-	APBD Kabupaten
		Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	Kabupaten Malang	0 Kali	-	APBD Kabupaten
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	Kabupaten Malang	0 Orang	-	APBD Kabupaten
2.211.16.09	PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir		100%	330.000.000	
2.211.16.09.01	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	Kabupaten Malang	125 KUMKM	330.000.000	APBD Kabupaten
2.211.16.11	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan		100%	1.550.000.000	
2.211.16.11.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	Kabupaten Malang	2500 Orang	1.550.000.000	DBHCHT

		Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan,peningkatan kualitas dan manajemen usaha	Kabupaten Malang	0 Orang	-	DBHCHT
2.211.16.11.02	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	Kabupaten Malang	0 Kali	-	DBHCHT
		Jumlah Pameran tingkat lokal,tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	Kabupaten Malang	0 Kali	-	DBHCHT

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan diharapkan guna mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai prinsip-prinsip perkoperasian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2019 Rencana Kerja ini terdapat 10 (sepuluh) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Rencana Kerja ini sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019 diharapkan manfaat pelaksanaan kegiatan dapat membantu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Daerah serta sebagai penunjang pembangunan Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI